

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

1. Tinjauan Kebijakan

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan publik diartikan sebagai sejumlah tindakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum bagi semua warga negara dan penduduk diselenggarakan, pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administrasi oleh instansi pelayanan publik. Pengertian ini berarti bahwa pemerintah telah menetapkan peraturan terhadap kinerja pelayanan publik yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pokok.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (7), dalam menjalankan layanan publik, standar pelayanan harus dijadikan sebagai patokan utama yang memandu penyelenggaraan layanan dan sebagai referensi untuk mengevaluasi kualitas layanan. Standar ini merupakan komitmen dan jaminan yang diberikan penyelenggara kepada masyarakat, dengan maksud menyajikan layanan yang unggul, responsif, mudah dijangkau, dan dapat dinilai secara obyektif.

Sebagaimana yang tertulis pada pasal 20 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengembangkan standar pelayanan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kemampuannya sendiri, kebutuhan masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait harus dilibatkan dalam persiapan ini. Kepuasan masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan diharapkan akan dihasilkan dari efektifnya penerapan standar pelayanan publik. Penyelenggara harus berpegang teguh pada nilai-nilai efikasi, efisiensi,

kreativitas, dan komitmen mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga masyarakat menerima pelayanan yang memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan masyarakat.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sebagaimana yang tercantum dalam bagian pertimbangan UU No 17 Tahun 2023 menimbang bahwa negara memberikan jaminan atas hak setiap warga negara untuk mencapai kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera baik secara fisik maupun mental. Tujuan utamanya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan generasi penerusnya untuk mendorong kesejahteraan umum. Dalam pertimbangan ini, pembangunan kesehatan masyarakat tetap perlu memperhatikan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan manajemen kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Prinsip-prinsip yang mendasari hal ini meliputi kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminasi, partisipasi, dan keberlanjutan, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang produktif, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan ketahanan kesehatan, jaminan hidup sehat bagi semua warga negara, serta peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh dan daya saing nasional dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pasal 3 menguraikan tujuan penyelenggaraan kesehatan, yang meliputi: (a) meningkatkan perilaku hidup sehat; (b) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; (c) meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; (d) memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; (e) meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah; (f) menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan,

efektif, dan efisien; (g) mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan; dan (h) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.

Pendorong serta peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan inisiatif kesehatan terletak pada tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan diakses dengan terbuka bagi partisipasi masyarakat. sebagaimana disebutkan dalam ayat 41 huruf (b), urusan kesehatan di tingkat desa/kelurahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keterlibatan masyarakat, dikoordinasikan oleh Unit Pelayanan Kesehatan. Sebagai yang tertera dalam Pasal 417, untuk mempercepat tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang tertinggi, partisipasi masyarakat diperlukan dalam semua aspek dan tahapan pembangunan kesehatan, baik secara individu maupun melalui organisasi.

c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Dalam bagian pertimbangan Permenkes No 43 Tahun 2019 menimbang bahwa untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam upaya menyelenggarakan layanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas dan berkelanjutan, serta untuk menjamin keselamatan pasien dan masyarakat, diperlukan penyusunan organisasi dan kerangka kerja yang terstruktur di dalam pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, penyesuaian tersebut Harus disesuaikan dengan arahan kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan inisiatif kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 2 menyatakan bahwa Puskesmas bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kesehatan guna mencapai tujuan menciptakan wilayah kerja yang sehat, dengan masyarakat yang: Berperilaku sehat, termasuk memiliki kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk menjalani hidup sehat.

- a. Mampu mengakses layanan kesehatan berkualitas
- b. Hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatan.
- c. Memiliki tingkat kesehatan yang optimal, baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan Puskesmas, yang mencakup: a. konsep kesehatan holistik; b. tanggung jawab teritorial; c. pemberdayaan masyarakat; d. akses pelayanan kesehatan yang merata; e. penerapan teknologi yang sesuai; dan f. integrasi dan kelanjutan pelayanan. Sesuai dengan prinsip konsep kesehatan holistik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf a, puskesmas mendorong semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko kesehatan yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

d) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam bagian pertimbangan PP No. 45 Tahun 2017 menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam

mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 5, dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dimana kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat

2. Tinjauan Teori

a. Administrasi Pembangunan

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris "*administration*", dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai manage (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda "*administratie*", yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya (Marliani, 2019).

Menurut (Duadji et al, 2020), Administrasi berkaitan dengan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, karena administrasi didasarkan pada manusia, tujuan administrasi semata-mata adalah kepentingan manusia. Sedangkan Pembangunan menurut Siagian (2016) dalam bukunya yang berjudul "Administrasi

Pembangunan" merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilakukan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai semua proses dan upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang terencana dan sadar di semua aspek kehidupan dan penghidupan. Proses ini mencakup pengambilan dan pelaksanaan keputusan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan modernitas dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi telah cukup lama dikenal khususnya di dalam pengkajian peranan anggota di dalam suatu organisasi, baik organisasi yang sifatnya tidak sukarela (*nonvoluntary*) maupun yang sukarela (*voluntary*). Istilah partisipasi serung diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembangunan sosial yang khusus, demokrasi politik dan sosial (Slamet, 1994)

Partisipasi menurut Ngongare (2019) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan menurut Mikkelsen (1999) bahwa partisipasi merupakan proses keterlibatan aktif yang mewajibkan individu atau kelompok yang terlibat untuk mengambil langkah awal dan menggunakan kebebasannya untuk berkontribusi secara sukarela pada suatu proyek tanpa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Maka dari kedua para ahli yang memberikan defenisi partisipasi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang disengaja, sukarela, dan aktif dari seorang individu, sekelompok orang, atau masyarakat dalam program pembangunan. Keterlibatan ini terjadi pada setiap tahap program, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau pemberdayaan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Emile Durkheim (Prasetyo & Irwansyah, 2019), masyarakat dianggap sebagai entitas objektif yang eksis secara mandiri, terlepas dari individu-individu yang menjadi bagian darinya. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan sekumpulan dari individu-individu yang hidup berdampingan, berinteraksi, dan mengembangkan rasa persatuan dalam kolektif, membentuk kerangka hidup bersama. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai entitas yang lebih besar dan independen, melebihi sekadar kumpulan individu.

Menurut pandangan Ralph Linton (Prasetyo & Irwansyah, 2019), dari sudut pandang yang berbeda, masyarakat dianggap sebagai sebuah kolektivitas manusia yang telah berinteraksi dan berkolaborasi selama periode yang signifikan, memungkinkan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri. Linton menyatakan bahwa masyarakat memiliki batasan-batasan yang telah dijelaskan secara jelas, dan anggotanya merasa sebagai bagian dari suatu kesatuan sosial yang terorganisir.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kedua sudut pandang ini menekankan pentingnya kesatuan sosial dan interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan pendekatan antara Durkheim dan Linton, keduanya menyoroti bahwa masyarakat melibatkan hubungan dan kesadaran kolektif di

antara anggotanya, menciptakan suatu entitas sosial yang lebih besar daripada individu-individu yang membentuknya.

Dari teori partisipasi dan teori masyarakat, maka ditarik kesimpulan bahwa definisi partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan sukarela anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, atau kegiatan sosial yang mempengaruhi mereka. Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi hasil.

Menurut Conyers (1984) pentingnya partisipasi sebagai berikut:

- a) Program dan proyek pembangunan pada umumnya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan karena tidak akan mengetahui kebutuhan, keadaan, dan sikap masyarakat lokal.
- b) Dengan lebih memahami hal-hal spesifik, anggota masyarakat yang terlibat dalam tahap perencanaan dan persiapan suatu proyek atau program pembangunan akan lebih yakin akan keberhasilan proyek tersebut.
- c) Salah satu bentuk demokrasi adalah ketika masyarakat turut serta dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Menurut WHO yang dikutip oleh Sulaeman, E. S (2020), menjelaskan bahwa melalui proses partisipasi masyarakat, masyarakat diberikan kemampuan untuk terlibat aktif dalam definisi masalah, pengambilan keputusan faktor kesehatan, perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi, pengembangan layanan, dan inisiatif yang membawa perubahan.

2) Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen & Uphoff (1980), partisipasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yakni pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan; kedua, partisipasi dalam pelaksanaan; ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan; dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Jika keempat jenis partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama, akan muncul aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Participation in Decision Making*)

Cohen dan Uphoff mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan menentukan alternatif melalui berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini melibatkan berbagai bentuk, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, serta memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang diajukan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif yang didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif dan rasional.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in Implementation*)

Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program adalah sebagai kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan program, berbagai elemen terlibat, dengan pemerintah sebagai fokus utama pembangunan. Ini mencakup alokasi sumber daya dan dana, kegiatan administrasi, koordinasi, dan penjabaran program. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada faktor-faktor tersebut.

c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat (*Participation in Benefits*)

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dari hasil pelaksanaan program, yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitasnya. Keberhasilan program dapat diukur dari peningkatan output secara kualitatif, dan sejauh mana persentase pencapaian target kuantitatif terpenuhi. Evaluasi partisipasi dalam menikmati hasil program dapat dilihat dari tiga sudut pandang: manfaat material, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.

d) Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in Evaluation*)

Cohen dan Uphoff menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi terkait dengan penilaian menyeluruh pelaksanaan program bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Partisipasi dalam evaluasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu evaluasi langsung dan tidak langsung.

Menurut Slamet (1994) faktor-faktor yang mempengaruhi berasal dari masyarakat dan unit kelompok yang membentuk kelompok masyarakat itu sendiri. Perilaku individu dan ciri-ciri sosial seperti pendidikan, pendapatan dan lama tinggal berkorelasi kuat atau saling menentukan satu sama lain. Secara teoritis dimungkinkan untuk membangun korelasi antara kualitas individu dan tingkat partisipasi mereka. Faktor-faktor seperti pendidikan, lamanya berada di masyarakat, pendapatan, dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi. Menurut Sunarti (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat dari:

- 1) Intensitas sosialisasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal itu dibutuhkan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat.
- 4) Keaktifan fasilitator, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam pendampingan program partisipasi masyarakat.
- 5) Pengaruh masyarakat dari luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat yang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain akan mudah mendapat pengaruh dari luar.

c. Pengertian Posyandu

1) Pengertian Posyandu

Posyandu, sebagai bagian dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), merupakan inisiatif yang dikelola dan dijalankan oleh masyarakat, untuk kepentingan mereka sendiri, serta bersama-sama dengan mereka dalam pembangunan kesehatan. Fokusnya adalah memberdayakan masyarakat dan memastikan akses yang mudah bagi mereka dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar, dengan tujuan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Di samping itu, keberadaan Posyandu juga menandakan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Fokusnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama dalam menurunkan AKI dan AKB, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Posyandu, khususnya untuk mengurangi AKI dan AKB. Selain itu, upaya utamanya adalah meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama dalam menangani penurunan AKI dan AKB (Kementerian Kesehatan, 2011).

2) Sasaran Posyandu

Posyandu merupakan program pemerintah dibidang kesehatan, sehingga semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat/keluarga, yang menjadi sasaran utamanya adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan Pasangan Usia Subur (PUS) (Kementerian Kesehatan, 2011).

3) Fungsi Posyandu

Posyandu berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama untuk penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita. Yang dijelaskan sebagai berikut (Kementrian Kesehatan, 2011):

- a) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

- b) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

Program Posyandu ditujukan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan kesehatan ibu dan anak, sehingga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita dapat dicegah dan ditangani lebih dini oleh pemerintah.

4) Jenis Kegiatan Posyandu

Posyandu memiliki dua jenis kegiatan, yakni kegiatan inti dan kegiatan tambahan. Kegiatan inti Posyandu meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan diare. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kegiatan inti Posyandu:

a) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

1) Ibu hamil

Pemberian pelayanan kepada ibu hamil melibatkan penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dijalankan oleh kader kesehatan. Agar kesehatan ibu hamil dapat ditingkatkan, disarankan untuk menyelenggarakan Kelompok Ibu Hamil setiap kali Posyandu buka atau pada waktu lain sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam Kelompok Ibu Hamil:

- (a) Memberikan penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, kesiapan untuk menyusui, program KB, dan aspek gizi.
- (b) Memberikan perawatan payudara dan bimbingan tentang pemberian ASI.
- (c) Demonstrasi pola makan yang dianjurkan bagi ibu hamil

(d) Demonstrasi perawatan bayi baru lahir.

(e) Pelatihan senam bagi ibu hamil.

2) Ibu nifas dan menyusui

Pelayanan yang diberikan kepada ibu pasca melahirkan dan menyusui mencakup:

- a) Edukasi kesehatan, keluarga berencana, pemberian ASI, dan nutrisi, perawatan luka jalan lahir (vagina)
- b) Suplemen vitamin A dan tablet besi
- c) Perawatan payudara
- d) Senam pasca melahirkan

3) Bayi dan Anak Balita

Saat mengadakan pelayanan di Posyandu untuk balita, lebih baik memberikan stimulus yang menarik dan mendorong kreativitas dalam perkembangan anak. Ketika ruang pelayanan memungkinkan, disarankan agar anak-anak balita dapat berinteraksi dengan balita lain sambil ditemani oleh orang tua dan dibimbing oleh kader, alih-alih hanya digendong. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan permainan yang sesuai dengan tahapan perkembangan balita. Di posyandu, layanan balita mencakup yaitu:

- a) Penimbangan berat badan
- b) Penentuan status pertumbuhan
- c) Penyuluhan

Apabila terdapat tenaga kesehatan di Puskesmas, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Jika ada kelainan, pasien akan dirujuk ke Puskesmas.

b) Keluarga Berencana (KB)

Di Posyandu, kader kesehatan dapat menawarkan alat kontrasepsi tablet dan kondom sebagai bagian dari pelayanan KB. Alat kontrasepsi suntik dan konseling merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Puskesmas jika lokasinya dekat. Penempatan IUD juga dimungkinkan jika peralatan dan ruangan yang diperlukan tersedia.

c) Imunisasi

Petugas dari Puskesmas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan imunisasi di Posyandu. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program yang ditargetkan untuk bayi dan ibu hamil.

d) Gizi

Di Posyandu, kader kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan gizi. Mereka menyediakan berbagai jenis layanan, seperti penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, serta pemberian makanan tambahan. Jika ditemukan ibu hamil dengan status Kurang Energi Kronis atau balita yang tidak mengalami peningkatan berat badan selama dua kali berturut-turut atau berada di bawah garis merah, kader diwajibkan untuk segera merujuk mereka ke Puskesmas atau Poskesdes.

e) Pencegahan dan Penanggulangan Diare

Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan strategi utama di Posyandu untuk mencegah diare, sementara penanggulangannya melibatkan pemberian oralit. Jika dibutuhkan, petugas kesehatan juga dapat memberikan obat Zinc. Ada situasi di mana masyarakat dapat menambahkan kegiatan baru di Posyandu terdapat lima kegiatan utama yang telah ditetapkan, terdapat juga upaya perbaikan lingkungan

kesehatan, pemberantasan penyakit menular, serta sejumlah inisiatif pengembangan masyarakat berbasis desa lainnya (Kementerian Kesehatan, 2011)

Beberapa kegiatan tambahan yang kini telah dikenal dan dilaksanakan di Posyandu meliputi:

1. BKB (Bina Keluarga Balita)
2. Kelas Ibu Hamil dan Balita
3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya: Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum
4. PAUD merupakan upaya pendidikan dini bagi anak usia dini.
5. Program UKGMD bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gigi masyarakat desa.
6. Inisiatif PAB-PLP bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
7. TOGA adalah program diversifikasi pertanian dan pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan kesehatan keluarga.
8. Kegiatan ekonomi produktif seperti UP2K dan usaha simpan pinjam mendukung peningkatan pendapatan keluarga.
9. Tabulin dan Tabumas adalah tabungan khusus untuk membantu ibu bersalin dan masyarakat secara umum.
10. Program BKL fokus pada kesehatan lanjut usia.
11. Inisiatif KRR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
12. Pemberdayaan masyarakat termasuk fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan kelompok yang menghadapi masalah

kesejahteraan sosial, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Kementerian Kesehatan, 2011).

4) Waktu Penyelenggaraan Posyandu

Penyelenggaraan posyandu pada hakekatnya dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan kegiatan, baik pada hari buka posyandu maupun diluar hari buka posyandu. Hari buka posyandu sekurang-kurangnya satu hari dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan (Kementerian Kesehatan, 2011).

5) Tempat Penyelenggaraan Posyandu

Tempat penyelenggaraan kegiatan posyandu sebaiknya berada pada Lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan disalah satu rumah warga, halaman rumah, balai desa/kelurahan, balai RT/RW dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang dapat disebut dengan nama “Wisma Posyandu” atau sebutan lainnya (Kementerian Kesehatan, 2011).

6) Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Jumlah minimal kader untuk setiap posyandu adalah 5 (lima) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh posyandu, yakni yang mengacu pada system 5 meja. Adapun yang

dimaksud dengan system 5 meja disini bukan menunjuk pada arti harfiah meja, melainkan menunjuk pada jumlah dan jenis pelayanan, yang masing-masing pelayanan dilaksanakan secara terpisah. Guna meminimalisir salah penafsiran tentang system 5 (lima) meja, maka istilah tersebut diganti menjadi Langkah pelayanan.

Pelayanan yang dilaksanakan pada setiap Langkah dan para penanggung jawab pelaksanaannya, secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.

Lima Langkah Pelayanan Posyandu

Langkah	Kegiatan	Pelaksana
Pertama	Pendaftaran	Kader
Kedua	Penimbangan	Kader
Ketiga	Pengisian KMS	Kader
Keempat	Penyuluhan	Kader
Kelima	Pelayanan Kesehatan	Kader atau petugas Kesehatan

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2011

7) Tingkat Perkembangan Posyandu

Setiap Posyandu mengalami perkembangan yang berbeda-beda, sehingga pembinaan yang diberikan kepada masing-masing Posyandu juga beragam. Untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan Posyandu, telah dikembangkan metode dan instrumen penilaian yang dikenal sebagai Telaah Kemandirian Posyandu. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan Posyandu, yang

umumnya terbagi menjadi empat tingkat, yaitu sebagai berikut (Kementerian Kesehatan, 2011):

a) Posyandu Pratama

Posyandu Pratama merupakan Posyandu yang belum stabil, ditandai dengan ketidakrutinan pelaksanaan kegiatan bulanan dan jumlah kader yang sangat terbatas, yaitu kurang dari 5 orang. Kegagalan dalam menjalankan kegiatan bulanan Posyandu bisa disebabkan oleh jumlah kader yang minim, serta kesiapan masyarakat terhadap intervensi yang dilakukan. Untuk meningkatkan peringkatnya, perlu dilakukan motivasi kepada masyarakat dan penambahan jumlah kader.

b) Posyandu Madya

Posyandu Madya adalah Posyandu yang telah menyelenggarakan lebih dari 8 kegiatan setiap tahunnya, dengan jumlah kader rata-rata mencapai lima orang atau lebih. Meskipun begitu, cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yakni di bawah 50%. Salah satu langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kinerjanya adalah melibatkan tokoh masyarakat sebagai motivator dan lebih mendorong peran aktif kader dalam mengelola kegiatan Posyandu.

c) Posyandu Purnama

Posyandu Purnama merupakan Posyandu yang telah menyelenggarakan kegiatan lebih dari 8 kali dalam setahun, dengan setidaknya lima kader yang terlibat. Selain itu, cakupan kelima kegiatan utamanya melebihi 50%, dan mampu melaksanakan program tambahan. Posyandu ini juga telah mendapatkan dana dari program kesehatan yang dikelola oleh masyarakat. Namun,

meskipun demikian, partisipasi peserta masih terbatas, yaitu kurang dari 50% dari total jumlah KK di wilayah kerja Posyandu.

d) Posyandu Mandiri

Posyandu mandiri adalah Posyandu yang mengadakan kegiatan lebih dari 8 kali setiap tahun, dengan minimal lima orang kader. Tidak hanya itu, cakupan kelima kegiatan utamanya melebihi 50%, memiliki kapasitas untuk menjalankan program tambahan, dan menerima dana dari program dana sehat yang diikuti oleh lebih dari 50% KK di wilayahnya. Upaya intervensi berfokus pada pembinaan, termasuk pembinaan program dana sehat, demi menjamin kelangsungan program tersebut.

d. Strategi

1) Pengertian Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani kuno yang berarti "seni berperang" yang dimana suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju (Umar, 2001).

Strategi merupakan upaya individu atau organisasi dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebuah strategi memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya yang ada guna mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien serta memperoleh keuntungan yang diharapkan (Kurnia, 2023). Secara umum, strategi merupakan proses perencanaan oleh top manajemen yang bertujuan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan, melalui penyusunan upaya yang diperlukan (Taufiqurokhman, 2016).

Dalam konteks yang lebih khusus, strategi adalah serangkaian tindakan yang terus-menerus ditingkatkan, sesuai dengan

pandangan tentang keinginan dan harapan konsumen di masa depan. Fokusnya terletak pada pencapaian apa yang seharusnya terjadi, bukan hanya pada apa yang sedang berlangsung saat ini (Taufiqurokhman, 2016).

Dari teori yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah perencanaan dan tindakan terencana yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu. Ini melibatkan upaya individu atau organisasi dalam memanfaatkan pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya guna mencapai hasil yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Strategi juga merupakan proses perencanaan oleh manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan jangka panjang, serta serangkaian tindakan yang terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen di masa depan.

2) Cara membangun strategi

Dalam sebuah perusahaan, manajemen strategis memiliki peran penting dalam menentukan arah kerja. Salah satu keuntungan dari penetapan strategi yang baik adalah peningkatan efektivitas pimpinan dan tim. Proses pengembangan strategi perusahaan melibatkan beberapa tahapan, seperti merumuskan misi perusahaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih strategi spesifik sesuai dengan kebutuhan. Proses ini mencakup pemilihan tujuan baru, alokasi sumber daya, pertimbangan pengembangan atau diversifikasi produk, penetapan pasar domestik atau internasional, mengevaluasi potensi merger atau akuisisi, serta upaya untuk menghindari akuisisi oleh pesaing. Karena sumber daya perusahaan terbatas, strategi harus berani memilih alternatif terbaik

untuk memberikan dampak positif dan keuntungan maksimal. (Taufiqurokhman, 2016).

Sebuah strategi harus memberikan keunggulan komparatif dan, pada akhirnya, keunggulan kompetitif jangka panjang. Ini merupakan aspek penting dalam manajemen strategis. Dalam pembuatan manajemen strategis, pihak perusahaan telah menetapkan target atau tujuan yang jelas, didukung oleh aktivitas rutin yang mendukung pencapaian tujuan. Hal ini membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, menetapkan arah strategis, meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tujuan, dan meningkatkan produktivitas karyawan. (Taufiqurokhman, 2016).

B. Konsep Kunci

Mengacu pada tinjauan kebijakan dan tinjauan teori diatas, maka konsep kunci dalam penelitian tersebut adalah:

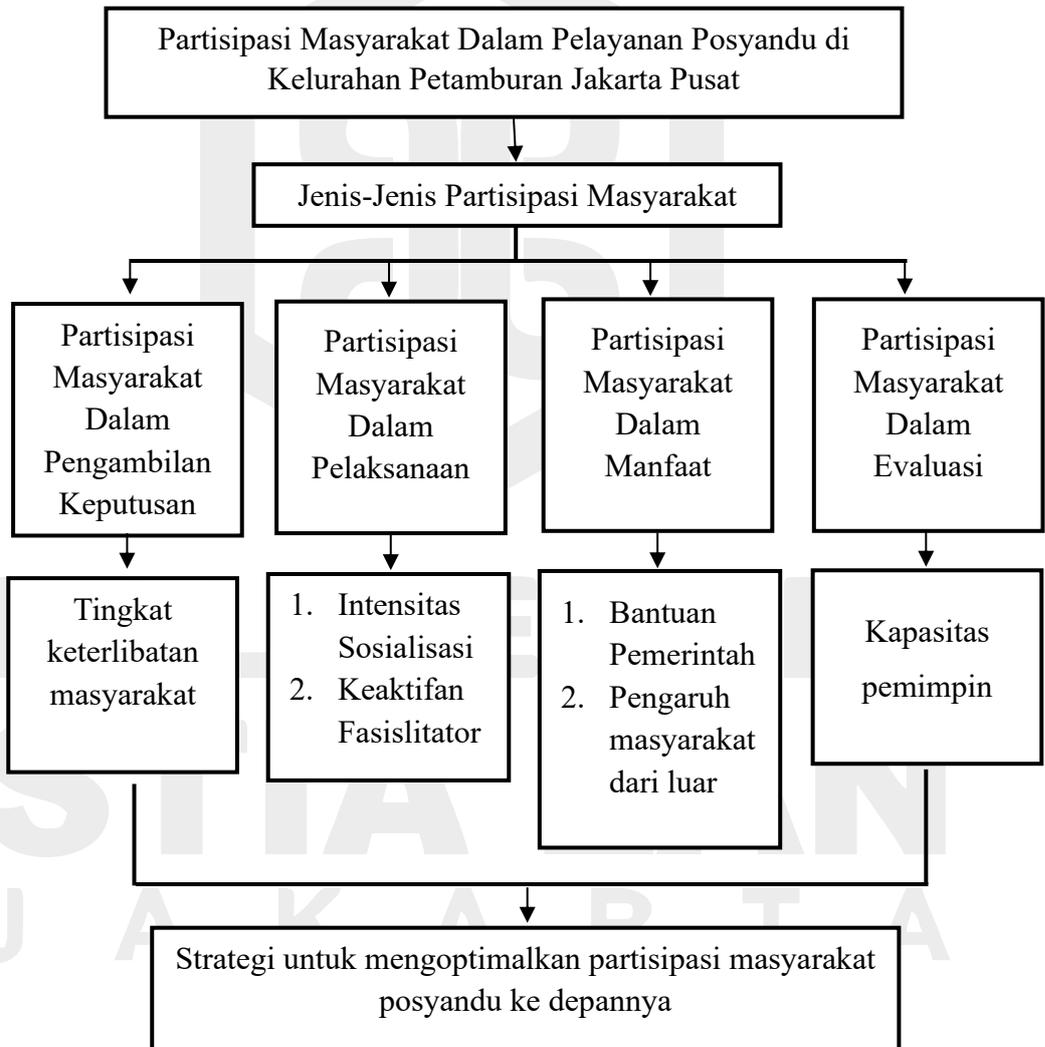
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan adalah segala sesuatu yang memengaruhi situasi atau kejadian dalam kegiatan posyandu tersebut, khususnya melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan posyandu di kelurahan Petamburan.
2. Strategi peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pelayanan posyandu di kelurahan petamburan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan, dapat dilihat dari 4 (empat) jenis partisipasi masyarakat menurut Cohen & Uphoff (1980), sebagai berikut:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
 - c. Partisipasi masyarakat dalam manfaat
 - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi
4. Penjabaran jenis partisipasi masyarakat akan dikembangkan dengan mengacu pada konsep dari Slamet (1994) dan Sunarti (2003), dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat, yang mencakup: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lama tinggal.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, dapat dilihat dari intensitas sosialisasi dan keaktifan fasilitator
 - c. Partisipasi masyarakat dalam manfaat, dapat dilihat dari bantuan pemerintah serta pengaruh masyarakat dari luar.
 - d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi, dapat dilihat dari kapasitas pemimpin.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

C. Kerangka Berfikir

Dalam penjabaran dari konsep kunci diatas terkait partisipasi Masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat, adapun kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Model Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah dari Cohen & Uphoff (1980); Slamet (1994) dan Sunarti (2003)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti selama proses penelitian, sehingga memungkinkan perumusan objek penelitian secara metodis, obyektif, dan logis. Sesuai dengan bidang yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian yang menghubungkan aspek-aspek yang telah ditetapkan (Danu Eko, 2015). Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pada partisipasi Masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat.

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian diartikan sebagai prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Kesuksesan sebuah penelitian ditentukan oleh pilihan metode penelitian yang diadopsi oleh peneliti. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, gejala dan objek penelitian dapat dirumuskan secara obyektif dan rasional secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan fakta dan teori yang terstruktur dengan baik.

Sebagaimana disampaikan dalam teori di atas, peran metode penelitian sangatlah penting dalam keberhasilan sebuah penelitian. Pemilihan metode penelitian yang sesuai dapat menjamin bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan, penting bagi peneliti untuk memilih metode penelitian yang sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian tersebut, agar hasilnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di wilayah tersebut

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah teknik pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah dilakukan (Murdiyanto, 2020). Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh data yang valid dan relevan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui komunikasi adalah wawancara, yang terdiri dari dua orang yang melakukan percakapan dimana orang yang diwawancara menjawab pertanyaan dan pewawancara menanyakannya. Adapun informan wawancara dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan Kunci	Jumlah
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1
2.	Ketua TP PKK Kelurahan Petamburan	1
3.	Petugas kesehatan Puskesmas Kelurahan Petamburan	1
4.	Ketua Posyandu di Kelurahan Petamburan	1
5.	Masyarakat peserta posyandu balita di kelurahan Petamburan	5
	Jumlah	9 Orang

Alasan dipilihnya orang-orang/pejabat tersebut diatas sebagai key informant penelitian adalah sebagai berikut

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dipilih sebagai informant karena dapat memberikan pandangan yang luas tentang bagaimana posyandu di Kelurahan Petamburan tersebut di organisir dan di jalankan.
- b. Ketua TP PKK Kelurahan Petamburan dipilih sebagai informant karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam posyandu di Kelurahan Petamburan serta peran posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- c. Petugas kesehatan Puskesmas Kelurahan Petamburan dipilih sebagai informant karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana posyandu diintegrasikan dengan layanan Kesehatan di Puskesmas serta menilai tingkat partisipasi masyarakat dari sudut pandang tenaga kesehatan.
- d. Ketua Posyandu Petamburan dipilih sebagai informant karena memiliki pemahaman langsung tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh posyandu dalam melayani Masyarakat di Kelurahan Petamburan.
- e. Masyarakat peserta posyandu dipilih sebagai informant karena dapat pendapat, persepsi, dan pengalaman mereka akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan.

3. Telaah Dokumentasi

Murdiyanto (2020) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan bukti apa pun yang didasarkan pada sumber baik tertulis maupun lisan, grafik, atau arkeologi dianggap sebagai dokumentasi dalam definisi yang paling luas. Dengan demikian, pengumpulan informasi tentang fenomena penelitian dari sumber tertulis seperti dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya disebut dokumentasi. Catatan, laporan, surat, buku, dan surat resmi lainnya dapat digunakan sebagai bahan referensi.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Murdiyanto (2020), memandang alat tersebut sebagai tes yang mengukur informan dengan menggunakan berbagai pertanyaan, yang dapat dicapai dengan menguraikan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dari hasil wawancara dengan *key informant* mengenai partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Posyandu. Namun, peneliti tidak hanya berfokus pada wawancara saja tetapi juga pada observasi dan dokumentasi. Berikut daftar pedoman instrumen penelitian:

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi merupakan instrumen yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara langsung mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Selain itu, mempermudah peneliti dalam mencatat mengenai aktivitas serta interaksi yang dilakukan oleh para peserta posyandu. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada kegiatan Posyandu di Kelurahan Petamburan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dengan membawa buku catatan untuk mencatat segala informasi yang diperoleh selama proses observasi.

2. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Murdiyanto, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam kepada ibu balita, kader posyandu dan Masyarakat tentang partisipasi masyarakat dan layanan posyandu di Kelurahan Petamburan. Pada wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan.

3. Pedoman Telaah Dokumen

Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan dari waktu lampau (yang direkam

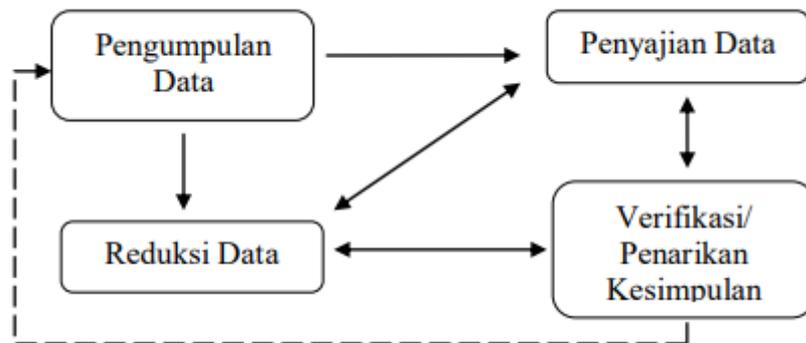
atau didokumentasikan), menyajikan hubungan antara informasi masa lampau dengan kondisi saat ini, dan merekam berbagai jenis data tentang informan (Murdiyanto, 2020). Pedoman ini akan memudahkan peneliti untuk memilah informasi yang bersumber dari jurnal, buku, artikel maupun perundang-undangan. Dalam hal ini dokumen yang digunakan yaitu:

- a. Peraturan dan Undang-undang tentang Kesehatan
- b. Pedoman Umum Pelayanan Posyandu
- c. Foto

D. Teknik pengolahan data dan analisis data

Menurut Noeng Muhadjir, seperti yang dikutip dalam penelitian oleh Ahmad & Muslimah (2021), analisis data merupakan proses sistematis untuk menemukan serta menggali data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan lainnya. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam kasus yang sedang diteliti dan menyajikan temuan yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analisis data yang digunakan oleh peneliti dideskripsikan berdasarkan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Mereka menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga semua aspek data terkaji secara menyeluruh. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 2.
Model Analisis Data Miles dan Huberman
Sumber: Murdiyanto (2020)

Model analisis data menurut Miles dan Huberman (Murdiyanto, 2020) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan

1. Reduksi Data

Merupakan tahapan analisis yang mengkategorikan, mengasah, memfokuskan, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan menyusun data untuk memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Tahap reduksi selanjutnya adalah pengumpulan data yang meliputi pencatatan, pengkodean, pembuatan partisi tema, peringkasan, dan lain sebagainya. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memusatkan perhatian yang lebih besar pada data yang telah diperoleh sebelumnya selama tahap pengumpulan data.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain diagram alur, infografis, deskripsi singkat, dan korelasi antar kategori. Peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dengan menggunakan penyajian data. Informasi yang diberikan

sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Posyandu di Desa Petamburan, yang bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan memudahkan analisis data. Sebelum menarik kesimpulan, penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk memperoleh keabsahan data dan memastikan data dalam keakuratan penelitian. Terdapat 2 jenis triangulasi yang digunakan yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode/Teknik, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda yaitu dari Kepala kesejahteraan Rakyat, Ketua TP PKK, Ketua Posyandu, Petugas puskesmas serta masyarakat. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat saling melengkapi dan menguatkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkannya dengan sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode untuk menilai keandalan data. Misalnya, informasi dikumpulkan melalui wawancara, diverifikasi melalui dokumentasi dan observasi, dan sebagainya. Untuk menentukan data mana yang dianggap akurat, peneliti akan melakukan diskusi tambahan dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan yang lain jika ketiga metode penilaian keterpercayaan data memberikan hasil yang berbeda. Alternatifnya, mengingat perbedaan sudut pandang, mungkin semuanya benar

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan yang harus divalidasi selama penelitian berlangsung. Penting untuk menilai kebenaran, validitas, dan

penerapan interpretasi yang dihasilkan dari data yang diperoleh sebelumnya, karena faktor-faktor ini bersama-sama menentukan validitas data. Setelah proses analisis, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikembangkan sebelumnya.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Bab ini akan menganalisis hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Posyandu di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

a) Partisipasi masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan mengacu pada pendekatan Teori Slamet (1994), yang menekankan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tingkat partisipasi ini dilihat dari berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan lama tinggal. Partisipasi masyarakat ini mencakup kehadiran ibu yang membawa balitanya ke posyandu untuk dipantau pertumbuhannya, partisipasi ibu kader yang melaksanakan tugas di posyandu, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait posyandu.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan masyarakat diketahui bahwa rata-rata masyarakat yang telah lama tinggal cukup aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu seperti yang disampaikan oleh informan 5 pada 24 April 2024 sebagai berikut: “Saya disini sudah tinggal 6 tahun dan saya cukup aktif mengikuti posyandu”. Namun, di sisi lain, dari hasil wawancara dengan informan 6 pada 24 April 2024 masih ditemukan masyarakat yang belum aktif mengikuti kegiatan posyandu, walaupun sudah lama tinggal di wilayah Petamburan.

Hal tersebut menandakan adanya partisipasi masyarakat, yaitu kehadiran ibu balita di Posyandu Kelurahan Petamburan, meskipun masih ada orang tua balita yang jarang membawa anak mereka ke

posyandu. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang mendorong ibu balita agar dapat berpartisipasi hadir dalam posyandu yaitu pertama, dari faktor Pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan partisipan, semakin luas pengetahuan mereka. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan, sedangkan orang dengan tingkat pendidikan rendah kurang memahami pentingnya layanan posyandu. Dari hasil wawancara dengan informan 3 sebagai PKK pada 19 April 2024 menyebutkan:

“Tingkat Pendidikan memang agak salah satu rintangan. Bagi masyarakat yang merasa tingkat pendidikan lebih tinggi mereka tidak mau pergi ke posyandu melainkan ke rumah sakit.”

Dari pernyataan di atas, diperkuat oleh informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan rakyat pada 19 April 2024 yaitu:

“Untuk lulusan SD, memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi. Jikapun diberikan motivasi kita berusaha untuk mengikuti cara berbahasa mereka biar mereka paham.”

Dari kedua data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan persepsi seseorang terhadap program Posyandu. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam cara menerima informasi dan memahami manfaat serta pentingnya kehadiran di Posyandu. Untuk mengatasi kendala tingkat pendidikan yang masih menjadi rintangan dan memerlukan solusi, Informan 4, selaku tenaga pelaksana gizi pada 30 April 2024, menjelaskan:

“Biasanya kita ini bekerja sama dengan lintas sektor terkait dengan semua Masyarakat kalangan apapun, kalau untuk kalangan menengah kebawah atau Pendidikan rendah, Masyarakat kurang paham pentingnya posyandu seperti apa, biasanya melakukan pendekatan secara individual, mengajak kader apabila balita tidak mau datang ke posyandu yaitu kami melakukan kunjungan ke rumah.”

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah atau dengan pendidikan rendah, terhadap pentingnya Posyandu. Hal ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan personal dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya Posyandu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat, diketahui bahwa rata-rata masyarakat peserta posyandu merupakan lulusan SMK, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan 6 pada 24 April 2024 yang menjelaskan hanya lulusan SMK. Dapat dilihat bahwa faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Selain faktor pendidikan, faktor penghasilan juga dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan posyandu. Faktor penghasilan ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Petamburan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah sering kesulitan memberikan asupan protein yang memadai, sehingga balita mereka rentan mengalami stunting. Oleh karena itu, posyandu hadir untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita yang terkena stunting. Berikut adalah pernyataan dari informan 1, Kasie Kesejahteraan Rakyat, yang disampaikan pada 19 April 2024, menjelaskan:

“Iya jadi di dalam keluarga punya balita kondisi stunting jadi mereka untuk memenuhi protein untuk anaknya kurang. Jadi kami disini para pihak pkk disini melakukan kegiatan masak untuk diberikan kepada balita yang terkena stunting.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang diberikan dari pihak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dalam menangani masalah stunting di masyarakat. Stunting merupakan kondisi dimana pertumbuhan balita terhambat akibat kurangnya asupan gizi yang memadai, terutama protein. Informasi ini mengindikasikan bahwa

pihak PKK secara aktif terlibat dalam mengatasi masalah ini dengan mengadakan kegiatan memasak untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita yang mengalami stunting. Pendekatan ini menunjukkan kepedulian dan peran aktif pihak PKK dalam mendukung kesehatan balita di lingkungan mereka, dengan memberikan solusi melalui program posyandu. Selain itu, ditambahkan juga pernyataan yang diberikan oleh informan 3 selaku PKK pada 19 April 2024 menjelaskan:

“Biasanya sih iya. Jadi kalo ada yang merasa tingkat pendidikannya tinggi dengan ekonomi yang lebih tinggi biasanya malu untuk ke posyandu. Mereka memberikan persepsi bahwa posyandu termasuk kalangan bawah”

Dari data diatas terlihat bahwa menunjukkan adanya stigma sosial terhadap posyandu sebagai tempat layanan kesehatan yang khusus ditujukan untuk kalangan ekonomi bawah. Hal ini juga mencerminkan tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dalam kegiatan posyandu, yang memerlukan pendekatan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas untuk mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran akan manfaat posyandu bagi semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat sudah menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan posyandu. Namun demikian, masih terdapat anggota masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat atau aktif dalam mengikuti kegiatan posyandu ini, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya informasi, keterbatasan waktu, atau hambatan lain yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara rutin.

b) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Pada aspek ini, akan melihat tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan konsep dari teori Sunarti (2003) dengan membahas bagaimana tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh para fasilitator posyandu dalam

menyebarkan informasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan bagaimana keaktifan para fasilitator dalam memotivasi serta mengajak warga untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan posyandu, termasuk peran mereka dalam mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi yang lebih luas dalam layanan kesehatan komunitas tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan Rakyat pada 19 April 2024, didapatkan informasi

“Pihak kelurahan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan antusiasme partisipasi mereka. Begitu juga jika ada tamu yang bukan warga setempat, mereka turut antusias menghadiri posyandu. Oleh karena itu, balita usia 0-5 tahun memang harus dibawa ke posyandu”

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pihak kelurahan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan antusiasme partisipasi dalam kegiatan posyandu. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat lebih *aware* terhadap manfaat posyandu. Selain itu, informan 4 sebagai tenaga pelaksana gizi pada 30 April 2024 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Pihak puskesmas menyarankan untuk kader memberikan info jadwal posyandu. Biasanya kelurahan yang membuat jadwal posyandu dalam 1 tahun. Jadi para kader menginfokan ke Masyarakat dan saat mendekati hari-H mereka mengumumkan pake toa masjid atau di grup ibu-ibu balita posyandu”

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pihak puskesmas memberikan saran kepada kader untuk secara aktif memberikan informasi tentang jadwal posyandu kepada masyarakat. Intensitas sosialisasi yang berkesinambungan oleh pihak kelurahan dan puskesmas dan kader telah meningkatkan antusiasme partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Selain itu, masyarakat juga sering mendapatkan

pemberitahuan yang teratur tentang waktu pelaksanaan posyandu, baik melalui pengumuman langsung dari toa masjid maupun dari grup whatsapp. Selain sosialisasi, keaktifan fasilitator juga dibutuhkan dalam kegiatan posyandu. Keaktifan ini mencakup peran fasilitator dalam memberikan informasi, mengajak partisipasi masyarakat.

Keaktifan fasilitator dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Petamburan. Fasilitator memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan balita, pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta manfaat layanan kesehatan yang tersedia di posyandu Kelurahan Petamburan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan Rakyat pada 19 April 2024, didapatkan informasi:

“Baik pimpinan lurah, sekretaris kelurahan, maupun staf lainnya harus mampu memotivasi keluarga agar memiliki semangat. Dengan berbagai cara, kita harus bisa mempengaruhi masyarakat. Posyandu dalam kelompok kerja (pokja) selalu memberikan pembinaan, arahan, edukasi, dan inovasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita serta ibu hamil di lingkungan tersebut.”

Untuk memperkuat data diatas, adapun hasil wawancara yang diberikan oleh informan 3 pada 19 April 2024: “Pihak PKK cukup aktif dalam partisipasi masyarakat”. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pimpinan seperti lurah, sekretaris kelurahan, maupun pkk memiliki tanggung jawab untuk memotivasi keluarga agar memiliki semangat dalam menghadiri posyandu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita serta ibu hamil di lingkungan tersebut melalui program-posyandu yang diselenggarakan. Untuk meningkatkan masyarakat yang belum hadir dalam mengikuti kegiatan posyandu, diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh informan 2 sebagai kader pada 24 April 2024: “Pihak kader biasanya melakukan *door to door*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan informasi, mengajak serta mengingatkan warga terkait jadwal dan manfaat kehadiran ke posyandu. Pendekatan door to door ini penting untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan informasi secara langsung dan dapat dipahami dengan baik, sehingga meningkatkan partisipasi dalam kegiatan posyandu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat, diketahui bahwa rata-rata respon masyarakat terhadap keaktifan fasilitator adalah positif, seperti yang disampaikan oleh Informan 5 pada 24 April 2024 yang menjelaskan bahwa fasilitator aktif dalam memberikan layanan. Dari data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa masyarakat memberikan respon yang sangat positif terhadap keaktifan fasilitator dalam menjalankan tugas mereka. Antusiasme masyarakat terhadap upaya fasilitator menunjukkan bahwa mereka merasa didukung dan termotivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan posyandu Kelurahan Petamburan.

c) Partisipasi Masyarakat dalam Manfaat

Pada aspek ini, akan melihat tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan konsep dari teori Sunarti (2003) yang menguraikan terkait bantuan dari pemerintah serta pengaruh masyarakat dari luar. Bantuan dari pemerintah untuk posyandu Kelurahan Petamburan berupa pemberian makanan tambahan atau yang biasa disingkat PMT. Pemberian makanan tambahan bertujuan untuk menjamin nutrisi balita dan mendorong partisipasi aktif dari para ibu balita di Kelurahan Petamburan.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memberikan manfaat kepada masyarakat posyandu di Kelurahan Petamburan, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa makanan

tambahan. Dari hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan Rakyat pada 19 April 2024, didapatkan informasi:

“Biasanya, bantuan dari kelurahan mencakup biskuit untuk balita, susu tambahan, dan kadang bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, ada juga makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak yang mengalami stunting, seperti daging, protein dari telur, dan susu.”

Pernyataan di atas diperkuat oleh Informan 4, selaku tenaga pelaksana gizi, pada 30 April 2024 menjelaskan:

“Kalo dulu ada pemberian makanan tambahan seperti biskuit, kalo sekarang sudah menuju pemberian PMT local, jadi pengolahan bentuk makanan segar yang diolah seperti apa yang mendapatkan nilai bergizi tinggi. Pemerintah itu selain memberikan edukasi juga memberikan makanan tambahan untuk balita bermasalah gizi.”

Dari kedua data diatas menunjukkan bahwa upaya dari pihak posyandu dan kelurahan untuk memberikan dukungan nutrisi tambahan kepada balita dan anak-anak yang membutuhkannya, sebagai bagian dari program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya pada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya diperkuat lagi oleh pernyataan informan 2 selaku kader pada 24 April 2024 menjelaskan: “Iya tapi lebih pihak kelurahan yang memberikan”. Dari data-data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada masalah gizi dengan menyediakan makanan tambahan yang bergizi tinggi. Selain bantuan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga turut memberikan dukungan kepada masyarakat posyandu di Kelurahan Petamburan. Dari hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan Rakyat pada 19 April 2024, didapatkan informasi:

“Untuk pengaruh masyarakat dari luar ada sih tetapi tidak terlalu mempengaruhi partisipasi dalam posyandu. Misalnya, ada karang taruna Indonesia, mereka membuat antusiasme untuk membuat

kolam gizi dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di wilayah ini”.

Dari data diatas menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh dari masyarakat luar seperti Karang Taruna Indonesia, hal itu tidak terlalu mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan posyandu di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna Indonesia, seperti membuat kolam gizi untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di wilayah tersebut, terlihat belum sepenuhnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya upaya dari pihak eksternal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program kesehatan, masih dibutuhkan strategi yang lebih efektif dan terarah untuk melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan posyandu. Kemudian ditambahkan juga, oleh informan 4 sebagai tenaga pelaksana gizi pada 30 April 2024, sebagai berikut:

“Pihak CSR yang memberikan makanan menu lengkap khususnya balita masalah gizi. Jadi diberikan ke puskesmas yang kemudian di kelola, diberikan edukasi, dipantau dengan program selama 90 hari. Program ini terlihat bagus karena dapat memberikan persepsi bagus untuk masyarakat yang sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.”

Dari data diatas menunjukkan bahwa program ini dianggap efektif karena memberikan persepsi yang baik kepada masyarakat, yang berpotensi meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan posyandu. Dengan demikian, dukungan dari pihak CSR ini menjadi penting dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak melalui posyandu di Kelurahan Petamburan. Pernyataan lainnya juga ditambahkan oleh informan 2 sebagai kader pada 24 April 2024 yang menyampaikan: “Terkadang ada sih, misalnya ada dari kecamatan atau walikota.”

Pernyataan lainnya juga ditambahkan oleh informan 3 sebagai PKK pada 24 April 2024 yang menyampaikan: “ya biasanya ada bantuan susu”. Dapat disimpulkan bahwa untuk sementara pengaruh langsung masyarakat dari luar atau LSM mungkin terbatas, upaya dan dukungan yang mereka berikan masih berpotensi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

d) Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Pada aspek ini, partisipasi masyarakat dalam evaluasi akan dijelaskan sesuai pada konsep dari Teori Sunarti (2003), yang menguraikan tentang kapasitas pemimpin. Teori ini menyoroti pentingnya peran pemimpin dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi terhadap posyandu Kelurahan Petamburan merupakan hal yang penting untuk membuat keberadaan posyandu dan layanan yang ada di dalamnya sesuai dengan harapan masyarakat dan tercapainya tujuan posyandu itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Kasie Kesejahteraan Rakyat pada 19 April 2024, didapatkan informasi:

“Ada jadi memang sebagai pimpinan baik lurah baik staf yang ada disini memang harus bisa mempengaruhi warga supaya punya semangat. Misalnya ada warga rt 5 itu orangtua nya tidak membawa anaknya untuk ke posyandu dengan memberikan berbagai alasan.”

Dapat dilihat bahwa hal ini menyoroti pentingnya peran pimpinan dalam memberikan motivasi, arahan, dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam posyandu. Dari pernyataan diatas, diperkuat oleh pernyataan dari informan 4 sebagai tenaga pelaksana gizi pada 30 April 2024 menyatakan sebagai berikut:

“Seperti pak lurah, kasi kesra bentuknya lebih rapat kordinasi, sosialisasi, program Kesehatan seperti apa. Misalnya ketemuan 3-4 bulan ada program a-z dilihat capaiannya seperti apa,

kekurangannya bagaimana sehingga nanti lintas sektor bisa membantu ke wilayah.”

Dapat dilihat bahwa hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan efektivitas program posyandu dengan melibatkan berbagai sektor dalam mendukung upaya kesehatan di wilayah tersebut. Pernyataan lainnya juga ditambahkan oleh informan 3 sebagai PKK pada 24 April 2024 yang menyampaikan:

“Tiap bulan ada namanya rapat pertemuan kita bahas apa yang harus dibahas Peran kader disini juga melakukan monitoring perbulan ke wilayah”

Dari data diatas menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dan terjadwal dalam memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan posyandu berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan masyarakat diketahui bahwa rata-rata kemampuan pelayanan para kader cukup baik dan ramah dalam mengikuti kegiatan posyandu seperti yang disampaikan oleh informan 9 pada 24 April 2024 sebagai berikut: “Para kader disini lumayan baik dan ramah”. Hal ini menunjukkan bahwa kader-kader Posyandu di sana telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung dan bersahabat bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Posyandu.

B. Pembahasan

Berdasarkan penyajian data di atas, peneliti akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan dengan merujuk pada teori Copen & Uphoff (1980), yang mencakup konsep dari Slamet (1994) dan Sunarti (2003).

a) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait posyandu di Kelurahan Petamburan menunjukkan sejauh mana mereka terlibat dalam program kesehatan. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Petamburan telah menunjukkan keterlibatan yang positif dalam kegiatan posyandu. Sebagai contoh, seorang informan yang telah tinggal di kelurahan tersebut selama enam tahun menyatakan bahwa dia aktif mengikuti kegiatan posyandu, menunjukkan kesadaran terhadap kesehatan anak balitanya. Namun demikian, masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang aktif atau bahkan jarang menghadiri Posyandu, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan manfaat Posyandu atau kendala-kendala praktis seperti kesibukan.

Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya layanan kesehatan dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang manfaat posyandu. Sebaliknya, mereka dengan pendidikan rendah mungkin kurang memahami peran posyandu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Dari wawancara dengan informan dari PKK, terlihat bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi hambatan dalam partisipasi aktif masyarakat, terutama jika mereka lebih memilih untuk mencari layanan kesehatan di rumah sakit daripada menghadiri Posyandu. Pendidikan sebagai faktor penghambat ini diperkuat dengan pengalaman dari informan lain yang menyatakan bahwa ada perbedaan pola pikir antara lulusan SD dengan mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Upaya untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka menjadi krusial dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan posyandu.

Selain pendidikan, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah mungkin

mengalami kesulitan dalam memberikan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak mereka, sehingga mereka cenderung lebih memanfaatkan layanan tambahan yang disediakan oleh Posyandu. Sebagai contoh, informan menyebutkan bahwa makanan tambahan yang disediakan di Posyandu sangat penting bagi balita yang mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Peran kader posyandu juga memiliki dampak besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Mereka tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang dapat membangun hubungan dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan personal dan kunjungan ke rumah, kader Posyandu dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi partisipasi aktif dalam Posyandu.

Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu termasuk peningkatan pendekatan sosialisasi dan edukasi yang lebih inklusif. Hal ini mencakup penggunaan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Pendekatan seperti kunjungan langsung ke rumah oleh kader atau penyelenggara posyandu dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat Posyandu atau stigma terhadap tempat pelayanan kesehatan ini.

b) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Menurut Cohen dan Uphoff (1980) bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program adalah sebagai kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan program, berbagai elemen terlibat, dengan pemerintah sebagai pusat utama pembangunan. Ini mencakup alokasi sumber daya dan dana, kegiatan administrasi, koordinasi, serta implementasi program. Partisipasi masyarakat merupakan tahap di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam menjalankan program posyandu.

Pada aspek ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan membahas intensitas sosialisasi dan keaktifan fasilitator di Kelurahan Petamburan yang menganut dari konsep Teori Sunarti (2003). Intensitas sosialisasi dan keaktifan fasilitator merupakan faktor penting dalam memastikan keberlangsungan program posyandu di Kelurahan Petamburan. Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu, tidak hanya sekadar pusat pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan, tetapi juga menjadi simbol penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya balita. Di Kelurahan Petamburan, Posyandu telah menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan keluarga dengan menyediakan layanan kesehatan dasar dan edukasi gizi. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan, puskesmas, serta kader Posyandu sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti kegiatan Posyandu. Kasie Kesejahteraan Rakyat, yang bertanggung jawab langsung atas program ini, menekankan bahwa sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengajak warga, termasuk tamu atau pendatang dari luar, untuk berpartisipasi aktif. Ini mencakup menginformasikan bahwa balita usia 0-5 tahun harus dibawa ke Posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan yang tepat.

Pihak kelurahan membuat jadwal pelaksanaan Posyandu selama satu tahun, yang kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pengumuman di toa masjid dan grup WhatsApp. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi tentang kegiatan Posyandu dapat diakses oleh seluruh warga dengan mudah, sehingga meningkatkan partisipasi dalam program-program kesehatan yang disediakan. Keberhasilan Posyandu juga sangat bergantung pada keaktifan dan komitmen fasilitator yang terlibat. Fasilitator tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga motivator utama dalam mendorong partisipasi masyarakat. Mereka bertugas untuk mengedukasi warga tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak, pencegahan gizi buruk, dan

layanan kesehatan lainnya yang tersedia di posyandu. Dalam hal ini, Kasie Kesejahteraan Rakyat juga menegaskan bahwa para pemimpin kelurahan dan stafnya harus memiliki keterampilan untuk memotivasi dan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pendekatan, termasuk melalui pembinaan dan arahan langsung kepada warga.

Selain kelurahan dan puskesmas, PKK dan kader Posyandu juga memiliki peran krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat. PKK aktif dalam menyuarakan program-program kesehatan kepada warga, sementara kader melakukan kunjungan *door-to-door* untuk memastikan bahwa setiap keluarga mendapatkan informasi langsung tentang manfaat dan jadwal Posyandu. Keterlibatan langsung ini tidak hanya memperluas cakupan sosialisasi, tetapi juga membangun hubungan personal antara posyandu dengan warga masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa respon terhadap upaya sosialisasi dan keaktifan fasilitator sangat positif. Masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap upaya kelurahan dan fasilitator dalam memberikan layanan kesehatan dan edukasi di posyandu. Antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dan komunitas dalam membangun kesadaran kesehatan telah membuahkan hasil yang nyata. Dari seluruh penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa sosialisasi yang efektif dan keaktifan fasilitator adalah kunci utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Petamburan. Penting untuk terus memperkuat koordinasi antar unit terkait, seperti kelurahan, puskesmas, PKK, dan kader, guna meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, serta memperkuat peran Posyandu sebagai lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

Jumlah kader Posyandu minimal adalah lima orang, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan sistem 5 meja. Sistem meja yang dimaksud merupakan langkah pelayanan yang diberikan oleh posyandu. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pelayanan Posyandu dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Langkah dalam kegiatan posyandu tersebut adalah pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan balita (Kementerian Kesehatan, 2011). Posyandu di Kelurahan petamburan termasuk kedalam tingkat perkembangan posyandu mandiri. Posyandu mandiri adalah Posyandu yang mengadakan kegiatan lebih dari 8 kali setiap tahun, dengan minimal lima orang kader. Tidak hanya itu, cakupan kelima kegiatan utamanya melebihi 50%, memiliki kapasitas untuk menjalankan program tambahan, dan menerima dana dari program dana sehat yang diikuti oleh lebih dari 50% KK di wilayahnya (Kementerian Kesehatan, 2011).

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, proses dimulai dengan langkah pertama yaitu pendaftaran. Saat pendaftaran, kader mencatat nama-nama balita yang mengikuti kegiatan Posyandu. Langkah kedua adalah penimbangan, di mana tidak hanya berat badan yang diukur, tetapi juga lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan tinggi badan dengan bantuan kader. Langkah ketiga adalah pencatatan. Setelah penimbangan selesai, hasilnya dicatat ke dalam buku Kartu Menuju Sehat (KMS) dan buku catatan kader. Langkah keempat adalah penyuluhan, di mana ibu balita diberikan informasi tentang perkembangan balita. Langkah terakhir adalah pelayanan kesehatan, di mana Posyandu Kelurahan Petamburan memberikan makanan tambahan dengan menu bernutrisi.

Meja 1. Pendaftaran



Meja 2. Penimbangan



Meja 3. Pencatatan



Meja 4. Penyuluhan



Meja 5. Pemberian Makanan Tambahan



Gambar 3. Lima Langkah Pelayanan Posyandu
Sumber: Data dokumentasi diolah peneliti, 2024

Penyebarluasan hari buka dilakukan oleh kader posyandu. Fasilitas umum seperti sarana ibadah dapat dijadikan sarana untuk menyebarluaskan informasi hari buka posyandu (Kementerian Kesehatan, 2011). Berdasarkan hasil observasi, posyandu di Kelurahan Petamburan dalam penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan oleh kader dengan disebarluaskan melalui toa masjid setempat ataupun grup whatsapp. Kader posyandu Kelurahan Petamburan mendapatkan jadwal hari buka posyandu dari jadwal yang sudah dibuatkan dalam 1 tahun. Tempat penyelenggaraan kegiatan posyandu sebaiknya berada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2011). Kegiatan posyandu Kelurahan Petamburan dilaksanakan di masing-masing posyandu tiap RW yang sangat mudah dijangkau oleh warga Kelurahan Petamburan.

Kebutuhan sarana berupa KMS/buku KIA, alat timbang (dacin, dan sarung, pita lila, timbangan, meteran) obat gizi (kapsul vitamin A, tablet tambah darah, oralit), alat bantu penyuluhan, buku pencatatan dan pelaporan. Sarana yang digunakan dalam kegiatan Posyandu mencakup berbagai peralatan penting untuk mendukung fungsi dan efektivitas

layanan. Di antaranya adalah buku KMS (Kartu Menuju Sehat) atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pemantauan kesehatan ibu dan anak (Kementerian Kesehatan, 2011). Berdasarkan hasil observasi, untuk kegiatan penimbangan, Posyandu di Kelurahan Petamburan dilengkapi dengan beragam alat timbang, termasuk timbangan gantung, timbangan injak, timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, dan meteran. Alat-alat ini digunakan untuk memastikan pemantauan yang akurat terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, terdapat juga alat bantu penyuluhan yang digunakan untuk memberikan informasi kesehatan kepada para ibu. Buku pencatatan dan pelaporan menjadi sarana penting untuk mendokumentasikan setiap aktivitas dan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama kegiatan Posyandu. Ini membantu dalam menyusun laporan kesehatan yang sistematis dan terstruktur.

Terselenggaranya pelayanan posyandu melibatkan banyak pihak, adapun tugas dan tanggung jawab kader pada hari buka posyandu diantaranya: menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana posyandu, termasuk menyiapkan makanan tambahan (PMT); melaksanakan pendaftaran pengunjung; melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke posyandu; mencatat hasil penimbangan di KMS atau buku KIA dan mengisi buku register posyandu; melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT; setelah pelayanan posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut (Kementerian Kesehatan, 2011). Selain kader, adapun tugas dan tanggung jawab petugas puskesmas, diantaranya: membimbing kader dalam penyelenggaraan posyandu; menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga Berencana (KB); menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, KB dan gizi kepada pengunjung posyandu dan masyarakat luas; menganalisa hasil kegiatan posyandu, melaporkan hasilnya kepada puskesmas serta

menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan posyandu (Kementerian Kesehatan, 2011).

Sebelum melaksanakan kegiatan di posyandu, para kader memulai dengan proses koordinasi yang intensif dan terstruktur bersama petugas kesehatan serta pihak terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk menyalurkan informasi mengenai sasaran peserta Posyandu, meninjau hasil kegiatan sebelumnya, dan menyusun rencana kegiatan yang akan datang. Proses ini, sebagaimana dinyatakan dalam pedoman Kementerian Kesehatan (2011), Hasil observasi di Posyandu Kelurahan Petamburan memperlihatkan bahwa PMT yang disediakan telah memenuhi kriteria makanan sehat dan bergizi, yang melibatkan upaya kader untuk merancang menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap kegiatan Posyandu juga diikuti dengan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kegiatan ini berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kegiatan Posyandu tidak hanya memberikan layanan kesehatan dasar tetapi juga berperan sebagai tempat edukasi kesehatan dan dukungan bagi keluarga, memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Gides.id, 2024). Koordinasi dan persiapan yang dilakukan oleh kader memastikan bahwa posyandu dapat berfungsi secara optimal, memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan serta menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan (Purnomo, 2023).

c) Partisipasi masyarakat dalam manfaat

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan mengenai partisipasi dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Petamburan, terlihat adanya perbedaan pengaruh dari upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal. Informan 1 yaitu Kasie Kesejahteraan Rakyat, mengungkapkan bahwa meskipun ada inisiatif dari luar seperti pembuatan kolam gizi oleh Karang Taruna Indonesia, upaya ini belum cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meski antusiasme

untuk memperbaiki kesehatan dan gizi anak-anak ada, metode yang digunakan mungkin belum cukup menarik atau mengikat masyarakat dalam kegiatan posyandu secara langsung.

Sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh Informan 4, seorang tenaga pelaksana gizi, pihak CSR yang memberikan makanan menu lengkap, mengelola distribusinya melalui puskesmas, dan melakukan edukasi serta pemantauan selama 90 hari, dinilai berhasil. Program ini efektif karena meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan sejumlah informan, pemerintah menyediakan berbagai jenis bantuan makanan tambahan. Salah satu jenis yang umum diberikan adalah biskuit untuk balita, yang kaya akan nutrisi penting seperti zat besi dan vitamin B. Makanan biskuit ini penting karena mudah disajikan dan dikonsumsi oleh anak-anak, membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Selain biskuit, susu tambahan juga menjadi bagian dari program bantuan, mengandung kalsium dan protein yang baik untuk pertumbuhan tulang dan perkembangan otot anak-anak.

Dari hasil observasi, menurut informan dari Kasie Kesra menjelaskan bahwa pemberian susu tambahan bertujuan memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif mereka. Lebih lanjut lagi, informan dari PKK menjelaskan bahwa ada juga program makanan tambahan (PMT) khusus untuk anak-anak yang mengalami stunting. PMT ini biasanya mencakup makanan bergizi tinggi seperti daging, protein dari telur, dan susu, dirancang untuk memberikan asupan gizi lebih lengkap dan memadai bagi anak-anak yang membutuhkannya. Informan dari tenaga pelaksana gizi menjelaskan bahwa sekarang lebih banyak diberikan PMT lokal yang diproduksi dengan memperhatikan nilai gizi yang optimal. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya memberikan bantuan, tetapi juga

memastikan bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi penerima, terutama dalam meningkatkan status gizi mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa bantuan makanan tambahan disalurkan melalui kelurahan untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada balita peserta posyandu di Kelurahan Petamburan. Program PMT di Kelurahan Petamburan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesehatan gizi balita. Pemberian makanan tambahan bertujuan untuk memperbaiki status gizi anak yang berisiko atau menderita kurang gizi, terutama balita yang berat badannya tidak naik selama tiga bulan berturut-turut atau berada di bawah garis merah pada KMS. Tujuan lainnya adalah untuk menambah energi dan zat gizi esensial (Langit, 2022).

d) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

Posyandu menjadi sebuah pilar yang penting dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat lokal seperti Kelurahan Petamburan. Posyandu bukan sekadar pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemantauan kesehatan bagi balita, anak-anak, ibu hamil, serta keluarga di sekitarnya. Evaluasi terhadap keberadaan dan efektivitas Posyandu sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan harapan masyarakat dan mencapai tujuan kesehatan yang telah ditetapkan.

Salah satu tantangan utama adalah merangsang partisipasi warga, di mana ada kasus orangtua yang enggan membawa anak-anaknya ke Posyandu dengan berbagai alasan yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemimpin Posyandu dalam memberikan sosialisasi yang efektif dan memotivasi warga untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sangat penting untuk menjangkau dan memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin keluarga di komunitas tersebut.

Pentingnya koordinasi dan perencanaan program kesehatan di tingkat posyandu juga ditekankan oleh informan 4, seorang tenaga pelaksana gizi

yang dimana dalam menjalankan tugasnya, tenaga pelaksana ini berkolaborasi langsung dengan kepala posyandu dan Kasi Kesra untuk mengatur rapat-rapat koordinasi rutin setiap 3-4 bulan. Rapat ini tidak hanya untuk mengevaluasi capaian program dari awal hingga akhir, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan tambahan dalam penyelenggaraan program.

Kader tidak hanya menyampaikan informasi dan memotivasi warga untuk mengikuti program kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memonitor wilayah setiap bulan. Kader juga harus mampu memotivasi, membimbing, dan menyuluh masyarakat agar memiliki pengetahuan, keinginan, dan kemampuan untuk menjalani hidup sehat melalui Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Posyandu yang tersedia, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) sesuai dengan kebutuhan keluarga (Kementerian Kesehatan, 2018).

Dari sudut pandang masyarakat, respons terhadap layanan posyandu umumnya positif. Informan masyarakat mencatat bahwa kader-kader di Posyandu Kelurahan Petamburan terbukti baik dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada warga. Keterlibatan aktif kader dan pemimpin Posyandu dalam memberikan pelayanan yang baik dan mendukung telah membantu membangun citra positif tentang Posyandu di mata masyarakat. Evaluasi terhadap posyandu di Kelurahan Petamburan menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam memimpin dengan efektif, koordinasi yang baik dalam perencanaan program kesehatan, dan peran aktif kader dalam monitoring dan pelayanan adalah kunci keberhasilan. Untuk memperkuat kapasitas pemimpin khususnya dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Petamburan, perlu diupayakan melalui pelatihan dan pengembangan, serta mengumpulkan masukan-masukan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas dari kapasitas pemimpin.

e) Strategi untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan kedepannya di Kelurahan Petamburan

Berikut strategi yang diberikan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat kedepannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pelatihan kader dan PKK posyandu secara berkala
Pelatihan ini akan membantu kader dan PKK memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Mereka akan belajar bagaimana cara menjadi agen perubahan di masyarakat, menginspirasi partisipasi aktif dalam posyandu, dan mempromosikan pentingnya kesehatan masyarakat. Serta Pelatihan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan komitmen kader dan PKK dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
- b. Memberikan penghargaan atau reward Penghargaan
Memberikan pengakuan atas kontribusi dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Petamburan dalam upaya menjaga kesehatan anak-anak dan keluarga. Penghargaan Ini memberikan dorongan psikologis yang positif dan meningkatkan rasa dihargai di antara peserta posyandu.
- c. Melakukan kerjasama LSM secara berkelanjutan
Membangun kerjasama yang berkelanjutan dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memiliki sumber daya untuk mendukung program posyandu. Kerjasama ini dapat mencakup pendampingan teknis, bantuan dalam pengadaan peralatan kesehatan, atau dukungan dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

C. Sintesis Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang membahas partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Petamburan ditemukan permasalahan yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait posyandu

Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis memberikan usulan agar dapat diatasi, yaitu melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Kelurahan Petamburan dapat mengadakan sesi penyuluhan rutin tentang pentingnya posyandu, manfaatnya bagi kesehatan balita dan ibu hamil, serta layanan yang disediakan. Ini bisa melibatkan petugas kesehatan, kader posyandu, atau anggota masyarakat yang terlatih. Selain itu, pemasangan spanduk, brosur, dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang posyandu.

2. Masih terdapat persepsi masyarakat bahwa posyandu termasuk kelas menengah ke bawah

Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis memberikan usulan agar dapat diatasi, yaitu perlu dilakukan edukasi secara lebih luas kepada masyarakat. Kelurahan bisa menyelenggarakan kampanye untuk memperkenalkan posyandu sebagai layanan kesehatan yang terbuka untuk semua golongan masyarakat, tanpa pandang bulu status sosial atau ekonomi. Penggunaan testimonial dari masyarakat berbagai lapisan juga dapat membantu mengubah persepsi tersebut.

3. Masih terdapat masyarakat yang belum rutin hadir ke posyandu

Untuk mengatasi permasalahan diatas, penulis memberikan usulan agar dapat diatasi, yaitu mengedepankan pendekatan personal dan terintegrasi. Misalnya, petugas kesehatan atau kader posyandu dapat melakukan kunjungan rumah secara rutin untuk mengingatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadwal posyandu dan pentingnya mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, penerapan sistem reward atau insentif bagi masyarakat yang rutin mengikuti posyandu juga dapat menjadi stimulus positif untuk meningkatkan partisipasi mereka.